

RESOLUSI KONFLIK AGRARIA DALAM PEMBANGUNAN BANDARA NEW YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (NYIA) DI KULON PROGO

AGRARIAN CONFLICT RESOLUTION IN CONSTRUCTION OF NEW YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (NYIA) IN KULON PROGO

Mei Pritanggung¹, Ichsan Malik², Beni Rudiawan³

Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan
(meipritanggung@gmail.com)

Abstrak -- Pembangunan bandara NYIA sebagai proyek strategis nasional, mendapat penolakan masyarakat. Tulisan ini membahas dinamika konflik antara masyarakat dengan Angkasa Pura I serta resolusi konflik yang dilakukan. Pendekatan penelitian kualitatif studi kasus dengan metode wawancara, FGD, studi pustaka, dan observasi. Konflik dilatarbelakangi kesenjangan kebijakan dengan opini publik. Konflik juga terkait faktor struktural, tumpang tindih kebijakan pertanahan Pemerintah Pusat dengan DIY. Kerumitan dan kompleksitas konflik karena keterlibatan 42 aktor. Fenomena ‘perempuan melawan’, keterlibatan aktivis serta pemerintah yang saling berlomba membangun persepsi masyarakat melalui berbagai media, merupakan gambaran dinamika konflik yang terjadi. Konflik menimbulkan konsekuensi; rusaknya kontrak sosial, intimidasi dan kekerasan, serta perubahan sikap masyarakat. Upaya perdamaian dilakukan oleh lembaga Pemerintah maupun Nonpemerintah. Pemkab yang berupaya persuasif, didukung Ombudsman RI yang mendorong dialog, serta keterlibatan Komnas HAM dalam memediasi pihak berkonflik. Litigasi sebagai resolusi konflik pertama, gagal mencapai *win-win solution*. Kemudian diinisiasi dengan langkah dialog, negosiasi maupun pendekatan individu, juga memaksimalkan ganti rugi dan pemberdayaan masyarakat. Orientasi penyelesaian hingga transformasi konflik dominan dilakukan Pemkab Kulon Progo, di samping peran pihak ketiga dalam menengahi konflik. Diharapkan, penelitian ini berkontribusi mendorong kelompok fungsional merumuskan mekanisme penyelesaian konflik agraria lintas sektor, terintegrasi dan terkoordinasi yang diperuntukan pada pembangunan kepentingan umum.

Kata Kunci: *resolusi konflik, konflik agraria, kepentingan umum*

Abstract -- Construction of NYIA airport as national project received society rejection. This paper discusses the dynamics conflict between society with Angkasa Pura I and conflict resolution. Qualitative approach of case studies with interview, FGD, study literature, and observations methods. Conflict caused by policy gap with public opinion. Conflicts related structural factors, overlapping land policies of the Central Government with DIY. The complexity of conflict because involvement 42 actors. The phenomenon of 'women against' and activist's engagement as well as the Government are vying to build the public perception through of media is an overview of the dynamics conflict. Conflict has consequences; damage social contract, violence and intimidation, the changing attitudes of society. Various peace efforts have been done by the Government or Non-governmental institutions. The

¹ Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

² Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

³ Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

district strives to persuasive, Ombudsman RI encourage dialogue, as well as the involvement of Komnas HAM in mediating. Litigation as first conflict resolution failed to achieve solution; then initiating with dialogue, negotiation or individual approach, beside of maximizing compensation and community empowerment. The district government is dominant in orientation of transforming; beside of the strategic role of third parties in mediating the conflict became important findings too. Hopefully, this study contributes to the academic with regards to the analysis of conflict resolution. This study encourages functional groups to form an integrated and coordinated mechanism for resolving agrarian conflicts in the development of public interests.

Keywords: conflict resolution, agrarian conflict, public interest

Pendahuluan

Tingginya kebutuhan lahan untuk kepentingan pembangunan harus berhadapan dengan eksistensi lingkungan. Eksistensi lingkungan khususnya sumber daya agraria menjadi objek utama terjadinya konflik. Berdasarkan data nasional⁴ jumlah konflik agraria terus meningkat, hal ini karena tingginya kompetisi perebutan tanah yang didasari ketersediaan tanah terbatas. Salah satu kasusnya adalah pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kabupaten Kulon Progo DIY sebagai proyek strategis nasional. Proses pembangunan menemui penolakan dan perlawanan masif dari masyarakat.

Ichsan Malik menyatakan bahwa konflik selalu ada dalam pengelolaan sumber daya alam (agraria) karena terlalu banyak pihak yang berkepentingan dengan kebutuhan dan tujuan berbeda.⁵ Lebih lanjut Christodoulou menyatakan konflik agraria tidak dapat dilepaskan dari relasi sosial yang terkait dengan kontrol dan penggunaan sumber-sumber agraria.⁶ Relasi sosial ini biasanya melibatkan elemen masyarakat, negara dan kalangan bisnis yang semua berusaha untuk memperjuangkan sumber daya agraria.

Pentingnya nilai tanah bagi kebutuhan masyarakat, sering kali dijadikan sebagai sumber konflik internal bangsa Indonesia. Menurut Wallensteen dan Sollenberg konflik intra-negara telah menjadi ancaman serius bagi keamanan

⁴ Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 659 kasus konflik agraria pada tahun 2017, tertinggi dari sektor perkebunan sebanyak 208 konflik, properti 199, dan infrastruktur 94.

⁵ Ichsan Malik, *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian*, (Jakarta: Kompas, 2017), hlm. 277.

⁶ Afrizal, *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*, (Palembang: Andalas University Press, 2006), hlm. 7.

dan perdamaian di akhir abad ke-20.⁷ Sulitnya penyelesaian kasus konflik pembangunan bandara NYIA telah mengakibatkan stabilitas keamanan terganggu (instabilitas) sehingga turut mengancam keamanan daerah.

Tren perlawanan cenderung berubah pasca reformasi, masyarakat lokal kini semakin sadar akan haknya dan berani menuntut serta mengekspresikan dalam bentuk perlawanan terbuka.⁸ Gerakan masif pendukung warga yang menolak diantaranya; Wahana Tri Tunggal (WTT), Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP), Jogja Darurat Agraria (JDA), dan sebagainya. Gerakan tersebut juga mengadopsi media sosial sebagai sarana untuk memperkenalkan, menyebarkan, serta menginformasikan gerakan komunal mereka kepada masyarakat luas. Gerakan tersebut lahir dari ketidakpuasan serta kritik terhadap kebijakan pemerintah yakni pembangunan bandara NYIA yang merugikan rakyat dan hanya mementingkan profit pihak tertentu.

Meminjam analisis Hans Antlov, masyarakat kini dapat dikatakan tidak lagi pasif dalam menyampaikan aspirasinya, sebaliknya mereka aktif dalam mengorganisir dirinya secara politik dan bahkan menolak secara tegas terhadap proyek-proyek negara yang merugikan mereka.⁹ Perubahan sikap politik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah merupakan gerakan sosial baru yang menciptakan ruang demokrasi semakin luas bagi masyarakat dalam menyuarkan aspirasinya.

Permasalahan pokok studi ini adalah tentang konflik agraria yang terjadi antara masyarakat di Kecamatan Temon dengan PT Angkasa Pura I yang melibatkan Pemerintah. Pembahasan difokuskan pada dinamika konflik dan resolusi konflik.

Aditjondro pernah menyimpulkan bahwa permasalahan-permasalahan agraria di Indonesia adalah bersifat multideminsional yang tidak bisa dipahami hanya sebagai permasalahan agraria saja.¹⁰ Memperkuat kesimpulan tersebut, Dianto Bachriadi mengibaratkan konflik agraria seperti puncak gunung es. Dari

⁷ Janie Leatherman, dkk., *Memutus Siklus Kekerasan: Pencegahan Konflik dalam Krisis Intranegara*. (Yogyakarta: UGM Press, 2004), hlm. 3.

⁸ Ichsan Malik, *loc. cit.*

⁹ Hans Antlov, *Citizen Participation in Local Governance: Experiences from Thailand, Indonesia*

and the Philippines, (Manila: Institute for Popular Democracy, 2004), hlm. 9.

¹⁰ Musleh Herry, *Kearifan Lokal dalam menyelesaikan Konflik Agraria* (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), hlm. 14.

berbagai jenis masalah lainnya, seperti konflik antar sistem ekonomi, konflik mayoritas dengan minoritas, masyarakat modern versus adat, negara dengan warga negara, konflik antar sistem ekologi, environmentalisme versus industrialisme.¹¹ Isu konflik agraria sebagai puncak gunung es, sedangkan bagian besar di bawah permukaan yaitu unsur-unsur dari konflik tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena dianggap sangat cocok untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan (Creswell, 1998),¹² Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, membenarkan pernyataan Yin bahwa studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata.

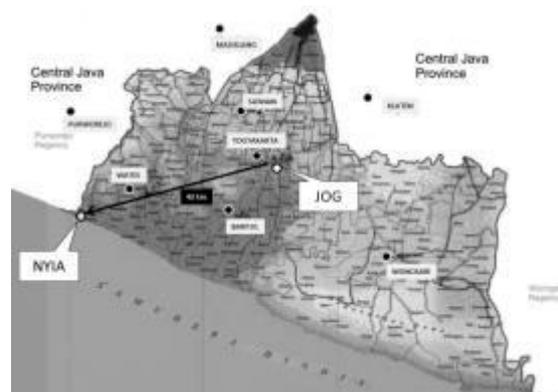
Penentuan narasumber menggunakan metode *purposive*. Sebanyak 26 narasumber dari berbagai unsur, dengan menggunakan metode

wawancara, FGD, observasi, dan studi pustaka.

Hasil Dan Pembahasan

Deskripsi Objek Penelitian

Bandara NYIA terletak pada 19 dusun meliputi 5 (lima) desa di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, yang sebagian besar merupakan kawasan pesisir. Sektor pertanian masih menjadi tumpuan perekonomian, meskipun kecenderungannya semakin menurun dari tahun ke tahun.¹³ Luas lahan tersebut setara lima hingga enam kali luas Bandara Adisudjipto, hampir setengahnya merupakan lahan pertanian produktif dengan warga terdampak kurang lebih 2.700 KK.



Gambar 1. Peta Lokasi Bandara NYIA
Pemerintah menggunakan *overcapacity* bandara Adi Sucipto untuk melegitimasi kebijakan pembangunan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 14.

¹² Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 8.

¹³ BPS Kabupaten Kulon Progo, *Statistik Daerah Kabupaten Kulon Progo 2017*, hlm. 1-2.

bandara baru. Namun hal ini disanggah oleh LBH sebagai pihak pertama yang mendampingi warga kontra. Bandara Adi Sucipto masih dapat dikembangkan lagi di samping program kerjasama yang telah berjalan untuk mengintegrasikan dengan bandara Adi Sumarmo (Solo) yang berjarak 50 km, juga menjadi alasan tidak perlunya membangun bandara baru.¹⁴

Status hukum tanah yang berada pada Izin Penetapan Lokasi (IPL) pembangunan bandara terdiri dari tanah hak milik pribadi (SHM), tanah milik Pakualaman (kurang lebih 18% dari total lahan calon bandara atau 160,2 ha dengan status HGB), dan tanah wakaf.

Eksistensi Pakualaman Ground itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari status Yogyakarta sebagai daerah istimewa yang memiliki landasan filosofis, historis, yuridis, sosio-psikologis dan akademis yang spesifik.¹⁵ Wilayah DIY sebagai bagian integral dari Indonesia tidak lepas juga dari proses pelaksanaan redistribusi tanah objek *land reform*¹⁶. Namun, penerapan UUPA di DIY mengalami kendala baik secara yuridis maupun praktisnya.

Maraknya konflik tanah di jogja akibat dari UU keistimewaan, tumpang tindih kebijakan.¹⁷ Negara bertindak sebagai agen ganda, yakni mengakui kewenangannya dalam mengatur tanah di DIY, tetapi juga mengakui kewenangan kerajaan dalam mengatur tanah.

Dinamika Konflik

Latar Belakang Terjadinya Konflik

Setidaknya 6 (enam) tahun belakangan, masyarakat mengalami pergolakan sosial. Latar belakang terjadinya konflik ialah perebutan sumber daya agraria (lahan/tanah) demi kepentingan yang berbeda. Hal ini tergambar dari upaya litigasi yang ditempuh maupun proses komunikasi yang saling memaksakan kehendak setiap pihak.

Kasus konflik ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan publik dengan opini publik. Kebijakan pembangunan bandara yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, harus berbenturan dengan kondisi ketergantungan warga terdampak terhadap tanahnya.

¹⁴ Wawancara dengan Satrio di Kantor LBH Jogja, pada 19 September 2018.

¹⁵ Cornelis Lay, dkk., "Keistimewaan Yogyakarta: Naskah Akademik dan Rancangan Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta", *Monograph on Politics and Government*, Volume 2 (1), Tahun 2008, hlm. 10-24.

¹⁶ *Land reform* berlaku di Indonesia sejak bergulirnya UU Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) tahun 1960.

¹⁷ Wawancara dengan Wahyu di Dinas pertanahan dan tata ruang DIY, pada 19 September 2018.

Pembangunan bandara yang di dalamnya ternyata masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan. Hal ini justru berseberangan dengan harapan masyarakat terdampak. Masyarakat berharap paling tidak pemerintah duduk bersama dengan masyarakat untuk membahas mengenai bandara. Kebijakan yang dianggap mengabaikan hak-hak warga terdampak dan memaksakan hak atas negara, pada akhirnya menimbulkan konflik vertikal.

Faktor Konflik

Ichsan Malik membagi faktor konflik menjadi tiga bagian yaitu struktural, akselerator, serta pemicu konflik.¹⁸ Potensi konflik agraria di DIY yang tergolong tinggi, dan semakin meningkatnya tingkat kompetisi untuk mengakses sumber daya agraria tersebut. Ichsan Malik pernah menyatakan bahwa konflik selalu ada dalam pengelolaan sumber daya alam karena terlalu banyak pihak yang berkepentingan dengan kebutuhan dan tujuan berbeda.¹⁹ Masyarakat harus saling berhadapan dengan Pemerintah, Perusahaan dan Kerajaan dalam posisi yang tidak seimbang, di samping keterlibatan para

investor. Dapat disimpulkan bahwa akar konflik ini berkaitan dengan adanya akses kontrol dan ketidakadilan pengelolaan sumber daya agraria.

Masing-masing pihak memiliki kepentingan yang harus diperjuangkan. Kepentingan yang sama-sama mendesak yaitu pembangunan bandara baru bagi DIY berhadapan dengan kekhawatiran warga tidak bisa bertahan hidup jika harus beralih profesi. Mengingat tanah sebagai ruang hidup dan penghidupan merupakan salah satu kebutuhan fisiologis, yang mempunyai pengaruh paling besar dari semua kebutuhan.²⁰ Adanya perbedaan nilai, dimana terdapat acuan yang berbeda dalam menetapkan benar atau salahnya suatu masalah.

Terbitnya surat keputusan Izin Penetapan Lokasi (IPL) bandara NYIA, sontak mendapat penolakan serta perlawanan masyarakat terdampak. Pemerintah ditengarai tidak menerapkan partisipasi masyarakat pada saat perumusan kebijakan, dengan anggapan tidak perlu.

Keterlibatan investor asing turut memunculkan dugaan bahwa pembangunan bandara hanya diperuntukan untuk kepentingan pihak

¹⁸ Ichsan Malik, *op. cit.*, hlm. 234.

¹⁹ Ichsan Malik, *op. cit.*, hlm. 277.

²⁰ Jess Feist dan Gregory J. Feist. *Teori Kepribadian*. (Jakarta: Selemba Humanika, 2010), hlm. 332.

tertentu. Serta tersandungnya AMDAL dalam pembangunan bandara merupakan pemicu terjadinya penolakan serta perlawanan yang masif dari masyarakat terdampak. Ketidakjelasan janji dan solusi dari pemerintah terkait keberlangsungan hidup masyarakat terdampak menjadi catatan buruk upaya komunikasi yang dilakukan. Lambatnya kepastian ganti rugi, relokasi dan alih profesi warga terdampak, turut menjadi pergolakan di masyarakat.

Aktor

Peneliti mengidentifikasi setidaknya terdapat 42 aktor yang terlibat dalam konflik pembangunan bandara NYIA ini. Terdiri dari lima aktor utama konflik, 23 aktor yang terlibat langsung, dan terdapat sebanyak 19 aktor pihak ketiga atau eksternal yang turut menambah kompleksitas dan kerumitan konflik. Di samping 4 (empat) aktor merupakan pihak yang mengupayakan terjadinya perdamaian.

Aktor provokator pada konflik ini dapat dianalisa dari dua sisi masing-masing pihak. Kemunculan dan keberadaannya turut menambah kompleksitas konflik. Sebab logika abnormal yang dimiliki oleh

aktor ini biasanya disebarkan dalam bentuk distorsi informasi dan ditelan bulat-bulat oleh kelompok rentan.²¹ Mahasiswa serta aktivis menurut Pemerintah maupun PT AP I merupakan provokator, karena telah membangun persepsi baru bagi masyarakat. Sebaliknya, keikutsertaan mahasiswa dan aktivis dalam kasus ini dengan persepsi bahwa pembangunan bandara NYIA telah menyematkan kata 'kepentingan umum', sehingga masyarakat bukan terdampak memiliki hak untuk berpartisipasi dengan berbagai cara (kritik, saran maupun solidaritas).

Kelompok rentan yakni masyarakat terdampak, mengalami ketimpangan ekonomi akibat pengangguran dan kemiskinan. Lebih jauh masyarakat ini sangat rentan terhadap tindak kekerasan sebagai penyalur rasa frustrasi mereka karena tidak berdaya dalam mengakses sumber daya agraria maupun ekonomi. Pemerintah bersama aparat yang merupakan kelompok fungsional, aktif mengupayakan penghentian hingga transformasi konflik. Yakni dengan membentuk dua tim pelaksana (tim persiapan dan tim keberatan) guna

²¹ Ichsan Malik, *op. cit.*, hlm. 234

mempercepat proses pembangunan bandara.

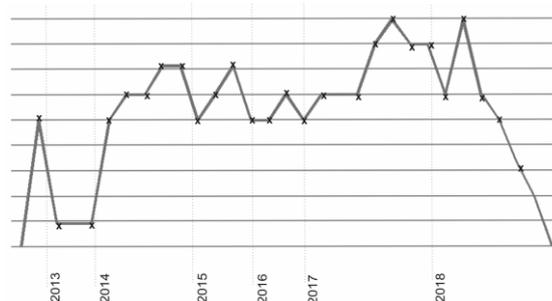
Aktor media pro dan kontra turut serta mempengaruhi persepsi masyarakat luas sebagai pihak ketiga dalam merespon konflik bandara. Respon ini kemudian menjadi dasar setiap tindakan mereka dalam keterlibatannya dalam konflik ini. Sebut saja aksi-aksi solidaritas yang dilakukan berbagai aktivis dalam dan luar negeri kepada masyarakat kontra, yang nantinya menjadi dukungan moril hingga semakin kuatnya penolakan yang dilakukan. Peran media juga turut mewarnai dinamika konflik yang terjadi, maka langkah selanjutnya untuk melibatkan media dalam upaya perdamaian menjadi penting.

Sedangkan fenomena 'perempuan melawan' telah menjadi hal populer dalam dinamika konflik. Bagi pihak pemerintah dan angkasa pura, hal ini termasuk siasat untuk menghadang eksekusi yang dilakukan.

Berlawanan dengan pernyataan tersebut, peneliti mengimplikasikan bahwa tindakan yang dilakukan menggambarkan ikatan yang sangat erat antara warga dengan tanahnya. Hal ini

terutama dipengaruhi oleh sosio-kultur masyarakat Jawa. Dimana terdapat berbagai proses ritual (*slametan*) yang sangat sering diadakan pada setiap kesempatan.²² Berbagai kegiatan tersebut tentu tidak pernah absen untuk melibatkan kaum perempuan, hal ini yang menjadi dasar kuatnya keterikatan perempuan terhadap lahannya.

Eskalasi dan Deeskalasi Konflik



Gambar 2. Eskalasi Konflik Pembangunan Bandara NYIA

Tingkat eskalasi dan deeskalasi akan turut memberikan kontribusi bagi konflik dan perdamaian.²³ Eskalasi yang terus meningkat akan memberikan pengaruh terhadap terjadinya pembangunan konflik. Sedangkan kondisi de-eskalasi konflik akan mendorong terjadinya pembangunan perdamaian.

Seiring dengan sosialisasi yang dilakukan pemerintah pada rentang tahun 2012 hingga 2013, konflik mengalami

²² Berbagai kegiatan kebudayaan maupun keagamaan telah melekatkan erat hubungan warga dengan tanahnya. Sebut saja; sedekah

laut, *nyadran*, *suro*, memasang pondasi hingga atap rumah, dan sebagainya.

²³ Ichsan Malik, *op. cit.*, hlm. 233.

stagnasi. Namun masyarakat mulai mengalami konflik horizontal, akibat dari terpolarisasinya suara masyarakat yang menolak dan mendukung pembangunan bandara. Tahun 2015 hingga 2016 merupakan rentang waktu masyarakat memperjuangkan haknya melalui jalur hukum.

Konflik serta pergolakan yang terjadi menimbulkan rasa ketidakamanan bagi masyarakat. Karena aman bagi negara belum tentu aman bagi warga negara di dalamnya. Kerap kali negara mengatasnamakan keamanan dan stabilitas nasional, melakukan tindakan represif sehingga menimbulkan rasa tidak aman (*human insecurity*) termasuk pengusuran terhadap rumah warga.

Selanjutnya konflik mengalami de-eskalasi setelah dilakukannya pengusuran besar-besaran. Namun kemudian muncul resistensi beberapa warga kontra untuk tetap bertahan meskipun rumah dan tanah pertanian sudah diratakan. Menanggapi hal ini Pemerintah dan PT Angkasa Pura I melakukan berbagai upaya resolusi konflik dalam bentuk pendekatan serta negosiasi. Upaya tersebut menghasilkan suatu kondisi yang lebih baik dari sebelumnya.

Kondisi warga yang bertahan mulai menunjukkan sikap pasrah dan menerima

kenyataan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat dilihat bahwa alasan yang mendominasi warga terdampak ialah merasa lelah dan masih memikirkan masa depan anak-cucu mereka. Alasan berat warga dan keputusan yang diambil hasil pergolatan pemikiran yang sangat panjang. Perasaan lelah dan pasrah tersebut merupakan hal yang dirasakan warga atas proses perjalanan konflik.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikategorikan beberapa faktor yang menjadi pendorong terjadinya deeskalasi konflik. *Pertama* faktor sosial, dimana masyarakat Jawa secara kultur memiliki sistem *bottom up* terkait merespon konflik. *Kedua* faktor ekonomi, semakin memburuknya kondisi warga kontra yang bertahan akibat hilangnya tanah sebagai mata pencaharian, telah memaksa mereka untuk mencari alternatif penghasilan. *Ketiga* faktor kehadiran mediator, baik Ombudsman RI maupun Komnas HAM, telah menjadi penengah yang baik bagi kedua pihak untuk saling menahan diri supaya konflik tidak bereskalasi.

Dampak

Dampak yang ditimbulkan yakni rusaknya kontrak sosial di masyarakat. Banyaknya internal WTT yang menerima negosiasi

dan bergabung dengan warga yang pro bersyarat. Kemudian warga yang masih menolak negosiasi membentuk PWPP-KP. Buntut dari perpecahan organisasi ini adalah tidak harmonisnya hubungan anggota antara WTT dan PWPP-KP. Polarisasi ini membuat pergolakan sosial terjadi di masyarakat. Berbagai kegiatan sosial seperti keagamaan dan kebudayaan, warga kontra cenderung untuk menyendiri. Desa yang biasanya sarat akan asas kekeluargaan, menjadi memudar karena perbedaan pandangan terkait pembangunan bandara.

Meminjam analisis Jeong tentang konflik, yaitu menyangkut adanya perbedaan dalam suatu opini, pertentangan, argumen dan tujuan yang tidak sejalan yang terjadi dalam setiap aspek sosial masyarakat.²⁴ Terdapat konflik horizontal antara warga pro dengan warga kontra dalam menanggapi pembangunan bandara NYIA. Bentuk konflik tersebut ialah saling sindir hingga enggan saling menyapa antar tetangga. Proses pembebasan lahan menggunakan cara yang dinilai represif kemudian menjadi pekerjaan rumah bagi

pemerintah. Teror, kekerasan fisik, pemutusan sarana penunjang kehidupan (pencabutan aliran listrik serta menghancurkan akses jalan berupa galian depan rumah), pencongkelan pintu rumah, hingga penyeretan paksa masyarakat turut mewarnai dinamika yang terjadi. Bahkan pengerahan aparat dalam jumlah besar juga dinilai merupakan hal yang berlebihan.

Semua itu berlawanan dengan komitmen awal PT AP I dan Pemerintah yang menggunakan cara-cara persuasif. Tindakan tersebut justru berlawanan dengan usaha mewujudkan keamanan manusia (*human security*) dalam sebuah tatanan masyarakat. Sejatinya kebutuhan rasa aman meliputi kebutuhan akan jaminan, stabilitas, perlindungan, ketertiban, bebas dari ketakutan dan kecemasan.²⁵

Kebutuhan untuk menciptakan dan memelihara keamanan, negara seringkali mengorbankan hak-hak individu warga negaranya.²⁶ Bagi Pemerintah, aksi perlawanan masyarakat yang berlarut membuat situasi tidak kondusif. Hal ini kemudian berdampak pada pembangunan

²⁴ Ho Won Jeong, *Understanding Conflict and analysis*, (London: Sage Publication, 2008), hlm. 6.

²⁵ A. Minderop, *Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus*. (Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, 2013), hlm. 283.

²⁶ Barry Buzan, *People, States and Fear*, (New York: Harvester Wheatsheaf, 1991), hlm. 43.

bandara sebagai salah satu proyek nasional tersendat.

Perubahan sikap masyarakat dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu konflik serta peralihan. Perubahan sikap masyarakat yang diakibatkan oleh konflik dapat dilihat dari aksi perlawanan yang dilakukan. Bentuk Perlawanan yang dilakukan terindikasi karena pengaruh dari mahasiswa dan aktivis lainnya, sehingga membuat kesan masyarakat terdampak menanggalkan identitasnya. Hal ini terkait dengan falsafah Jawa “*ngono yo ngono ning ojo ngono*” seperti yang diungkapkan beberapa narasumber dalam menganalisa perlawanan masyarakat. Diartikan sebagai kebebasan kepada siapapun untuk melakukan suatu tindakan, tetapi telah menjerumus pada pelanggaran norma dan etika.

Perubahan sikap yang diakibatkan oleh peralihan kehidupan masyarakat dari tanahnya berupa tempat tinggal dan profesi turut mengancam perilaku konsumtif dan kemiskinan. Warga terdampak saat ini hanya menganggur dan mengandalkan uang ganti rugi untuk hidup sehari-hari. Uang ganti rugi yang juga sudah banyak terserap untuk membangun kediaman baru. Kehilangan tanah sebagai tempat tinggal dan mata

pencaharian telah memaksa warga untuk memulai kehidupan baru dari awal.

Resolusi Konflik

Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah

Strategi-strategi yang dilakukan Pemerintah daerah (Kabupaten dan Provinsi) turut berkontribusi bagi terciptanya kondisi damai dalam konflik pembangunan bandara NYIA. Beberapa langkah sudah cukup berarti dalam upaya penyelesaian konflik, seperti koordinasi antarlembaga, sistem peringatan dini, membangun partisipasi masyarakat, hingga membangun penyelesaian alternatif.

Peran penting Pemerintah Kabupaten dalam keberhasilannya memfasilitasi kepentingan warga kontra, juga karena pendekatan yang dilakukan. Dengan mengutamakan prinsip persuasif, Pemkab terus berupa membangun komunikasi yang baik. Mulai dari Bupati melakukan pendekatan langsung pada masyarakat, hingga upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut. Hal inilah yang diupayakan Pemerintah Kabupaten, berusaha untuk bernegosiasi dengan masyarakat melalui pendekatan-pendekatan yang bersifat informalitas.

Sosialisasi dan konsultasi publik pada tahun awal konflik menurut warga tidak mencerminkan terpenuhinya berbagai tuntutan mereka. Warga menilai usulan mereka hanya ditampung dan tidak ditindaklanjuti. Konsultasi publik yang di dalamnya juga menghimpun suara masyarakat sepakat ataupun tidak sepakat terhadap pembangunan bandara, pada akhirnya hanya mengakomodasi kepentingan warga yang sepakat. Hal ini yang menjadi alasan warga bersikap acuh terhadap segala upaya kelompok fungsional.

Faktor keamanan, peran seperti Pemerintah Daerah, TNI, Kepolisian, Satpol PP, dan Intelijen daerah terlihat begitu kuat. Tergambar dari berfungsinya Kominda dalam melaksanakan koordinasi guna mempengaruhi suara masyarakat kontra. Dengan kata lain, lembaga pemerintah memiliki kesiapan dan sumber daya keamanan yang baik dalam memainkan perannya, hal ini juga didukung oleh legitimasi dan otoritas yang kuat.

Proses mediasi yang menjadi langkah penanganan konflik bisa menjadi efektif ketika para pihak memiliki kedudukan yang sama. Hal ini yang diupayakan oleh ORI sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan

publik yang menerima laporan dari masyarakat. Upaya resolusi konflik yang dilakukan ORI yaitu mendorong dialog antar pihak, dan mencairkan suasana, hingga membangun komunikasi konstruktif untuk menghargai satu sama lain. Sebagai hasilnya ORI telah memberikan beberapa rekomendasi kepada kelompok fungsional dalam penyelesaian konflik.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa lembaga nonpemerintah (Komnas HAM, kampus-kampus di DIY, dan LBH Jogja) turut mengupayakan penyelesaian konflik. Ketidakpercayaan warga kontra terdampak dengan setiap upaya resolusi yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga memunculkan sikap apatis warga. Maka kehadiran pihak ketiga disambut dengan respon yang baik oleh warga.

Komnas HAM sebagai mediator dalam konflik agraria pembangunan bandara NYIA. Penyelesaian melalui mediasi yang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan situasi kondusif bagi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana

tertuang dalam konstitusi.²⁷ Beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM dialamatkan kepada Pemerintah daerah, PT AP I, hingga Presiden. Rekomendasi berupa himbauan untuk menahan eksekusi sampai terjadi kesepakatan, pemenuhan akan hak warga sebagai konsekuensi pembangunan, hingga usulan penghitungan ulang harga dan luasan tanah.

Komunikasi konstruktif yang mampu dibangun oleh Komnas HAM kepada kedua pihak yang berkonflik, menandakan bahwa posisi pihak ketiga yang netral memegang peran yang strategis untuk turut menyelesaikan konflik.

Hal semacam sistem peringatan dini sebenarnya sudah dibangun oleh masyarakat sendiri sejak lama. Terwujudnya perdamaian dan keamanan masyarakat DIY pada umumnya merupakan hasil dari resiliensi masyarakat dalam merajut hubungan yang positif dan harmonis. Kemudian secara *bottom-up* menjadi mekanisme perekat perdamaian, meskipun terdapat akar konflik permasalahan yang begitu rapuh.

Pergolakan sosial yang terjadi telah mampu dibendung sehingga tidak berubah menjadi kekerasan bersifat komunal.

Upaya Menyelesaikan Konflik

Litigasi

Litigasi merupakan upaya resolusi konflik yang sifatnya *win-lose solution*.²⁸ Hal ini dikarenakan salah satu pihak dipaksa untuk menerima kekalahan. Terlihat dari proses hukum yang pada akhirnya dimenangkan oleh Pemerintah bersama PT Angkasa Pura I. Sedangkan masyarakat terdampak dipaksakan menerima kekalahan. Jika menurut Galtung ialah damai yang negatif (*negative peace*).²⁹

Setelah proses litigasi yang dimenangkan Pemerintah, upaya ini tidak serta merta mampu menghentikan konflik. Justru terjadi sebaliknya, aksi penolakan serta perlawanan cenderung meningkat dan bahkan semakin panas.

Dialog dan Negosiasi

Pemkab melakukan upaya *problem solving*, yang merupakan sebuah bentuk penyelesaian konflik dengan

²⁷ Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 8.

²⁸ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 35.

²⁹ Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means*, (London: Sage Publication, 1996), hlm. 16.

mempertahankan pendapatnya sendiri sekaligus berusaha untuk berkonsiliasi dengan pendapat pihak lain.³⁰ Melibatkan pihak ketiga yang dapat dipercaya oleh kedua pihak, atau duduk bersama dalam sebuah negosiasi.

Setelah menempuh upaya resolusi konflik melalui ranah hukum, penolakan warga justru semakin kuat. Hal ini kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan dialog maupun negosiasi. Sesuai dengan pernyataan Galtung yang menyebut bahwa konflik dapat diatur jika pihak yang berkonflik menemukan metode menegosiasikan perbedaan kepentingan dan menyepakati aturan main untuk mengatur konflik.³¹ Mengutip salah satu prinsip resolusi konflik dari Galtung maka negosiasi merupakan salah satu prinsip dari *peace making*.

Upaya Pemerintah dan PT AP I untuk bernegosiasi mendapat respon yang cenderung acuh, apatis, serta berkomitmen 'pokoke' dari warga. Hal ini ditengarai karena kekecewaan serta rasa sakit hati yang dialami warga akibat tindakan Pemerintah dan PT AP I sebelumnya. Kukuhnya penolakan pembangunan bandara oleh warga

terdampak, tidak serta merta menghentikan upaya berdialog pemerintah kabupaten. Tercermin dari pendekatan-pendekatan yang dilakukan bahkan oleh Bupati yang seringkali turun ke lapangan.

Menurut analisa peneliti, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki orientasi pada hubungan atau *relationship-centered orientation*,³² yang menganggap bahwa kepentingan pribadi dan kepentingan warga sama pentingnya dan keduanya dapat terwujud dengan seimbang. Pilihan orientasi ini menggunakan kompromi, akomodasi, maupun negosiasi. Orientasi ini tergambarkan ketika beberapa kali Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo menyambangi kediaman warga kontra, dan mencoba dialog. Meskipun terbilang sangat terlambat, dan warga terlanjur merasa sakit hati akibat tidak ada upaya seperti itu sedari awal.

Pendekatan dalam mengelola konflik yang dipakai oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah dengan menitikberatkan kepada negosiasi, agar warga tidak merasa dirampas haknya. Penyelesaian konflik persuasif

³⁰ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 57.

³¹ Johan Galtung, *op. cit.*, hlm. 21.

³² Gary Yukl, *Kepemimpinan dalam Organisasi*, (Jakarta: Prenhalindo, 1998), hlm. 305.

menggunakan cara perundingan dan musyawarah untuk mencari titik temu antara pihak-pihak yang berkonflik. Cara ini menghasilkan penyelesaian konflik secara tuntas, artinya tidak ada lagi perbedaan antara pihak-pihak, karena mereka dengan senang hati telah mencapai mufakat. Cara persuasif merupakan ketrampilan dalam menyelesaikan konflik yang menjadi tuntutan demokrasi.³³

Pendekatan Antar Individu

Pendekatan yang dilakukan di samping dialog dan negosiasi yang terus diupayakan kepada organisasi warga WTT dan PWPP-KP. Pendekatan secara individu juga telah dilakukan oleh Pemkab. Hal ini perlu dilakukan mengingat organisasi telah membuat kekuatan warga menjadi semakin percaya diri. Sehingga Pemerintah merasa perlu melakukan pendekatan secara individu. Tindakan ini menghasilkan suara individu dari masing-masing pribadi, dan akan lebih mudah untuk mengakomodasi kepentingan setiap masyarakat.

Penyelesaian konflik yang efektif, terdapat prasyarat yang harus dipenuhi yaitu, bahwa hak setiap pihak harus

didengar dan diperhatikan serta dipenuhi. Setelah itu baru bisa dimulai proses penyelesaian melalui dialog untuk mencari titik temu (*common ground*). Tanpa kesadaran pentingnya langkah ini, proses penyelesaian konflik tidak dalam arti sebenarnya.³⁴

Beberapa warga mengaku sudah lelah dalam pusaran konflik, dan menginginkan mengambil ganti rugi yang dikonsinyasi. Namun mereka menjadi merasa sungkan bila harus berpindah haluan dari suara organisasi, kekhawatiran akan sanksi sosial yang nanti diterimanya. Mengingat komposisi lokasi terdampak merupakan masyarakat tradisional yang kental akan budaya jawa. Sehingga diperlukan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan budaya masyarakat tersebut, untuk menjaga nama baik mereka. Hal ini didukung oleh pernyataan Ichsan Malik, bahwa dalam membangun perdamaian mau tidak mau harus menggunakan budaya setempat atau pendekatan lokal, serta menggunakan kebiasaan masyarakat.³⁵

Ganti Rugi

Ganti rugi sebagai kewajiban negara dalam menghormati hak warganya. Menjadi

³³ Maswadi Rauf, *Konsensus Politik*, (Jakarta: Dirjen PT, Depdiknas, 2000), hlm. 10-11.

³⁴ Musleh Herry, *op. cit.*, hlm. 61.

³⁵ Ichsan Malik, *op. cit.*, hlm. 231.

salah satu upaya resolusi konflik yang juga patut disoroti. Nilai ganti rugi sudah sesuai, karena melalui Tim Penilai dari pihak ketiga. Proses taksiran harga tanah telah melalui tahapan yang tepat dan transparan, sehingga menghilangkan peran oknum untuk ‘bermain’ di dalamnya. Aspek penilaian juga telah menyeluruh dalam melakukan penilaian.

Walaupun ganti rugi sudah sesuai, namun warga kontra bahkan tidak memedulikan besaran ganti rugi yang didapatnya. Mereka tetap merasa bahwa tidak ada proses jual beli, sehingga tanah masih tetap menjadi miliknya. Dengan anggapan sebanyak apapun uang yang didapat akan habis, jika mereka kehilangan mata pencahariannya. Hal ini kemudian mendorong Pemkab dan PT AP I menyelenggarakan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat terdampak. Sesuai dengan pernyataan bahwa terjadinya penurunan konflik didorong oleh adanya kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah melalui pengakomodasian kepentingan-kepentingan warga terdampak (Jeong, 2008).

Besaran ganti rugi didapat setiap warga berbeda, sehingga terdapat juga

warga yang tidak mampu. Diberikan akomodasi rumah dalam bentuk magersari. Pemerintah bahkan membebaskan pajak dari nilai ganti rugi yang didapat warga terdampak.³⁶ Hal tersebut sebagai bentuk untuk meringankan beban warga terdampak. Lebih lanjut, pendekatan hukum (*right-based*) dan pendekatan kepentingan seluruh masyarakat (*interest-based*) merupakan *win-win solution*.³⁷

Pemberdayaan Masyarakat

Melalui pemberdayaan masyarakat, merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada warga terdampak. Hal ini juga salah satu upaya penyelesaian konflik dalam mentransformasi konflik. Transformasi konflik merupakan pendekatan yang digunakan dalam proses rekonsiliasi sebagai upaya untuk memperbaiki pola hubungan antar pihak pasca konflik. Tahapan damai yang berhasil dicapai pada titik pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk mentransformasi konflik menjadi damai positif.

Kekhawatiran warga karena tidak bisa bertahan hidup jika menerima relokasi, disikapi oleh Pemkab dengan

³⁶ Wawancara dengan Supriyanta di Kanwil BPN DIY, pada 28 September 2018.

³⁷ Ichsan Malik, *op.cit.*, hlm. 157.

menyelenggarakan pelatihan keterampilan yang nantinya bisa menjadi bekal masyarakat untuk beralih profesi. Dalam bentuk pelatihan kerja dan pemberdayaan juga diberikan kepada warga terdampak, sebagai solusi jalan keluar atas kekhawatiran pada peralihan profesi. Penyelenggaraan pelatihan kerja dengan berbagai keterampilan dilakukan, untuk membekali warga dalam mendukung Kabupaten Kulon Progo sebagai kota bandara. Warga terdampak juga diberdayakan untuk terlibat pada proses pembangunan konstruksi bandara.

Pembangunan bandara NYIA dengan tetap memperhatikan keberlangsungan fungsi sosial masyarakat yang ada, merupakan wujud dari pembangunan berkelanjutan. Pindahan masyarakat terdampak dari tempat tinggal dan memaksanya beralih profesi, merupakan konsekuensi dari pembangunan yang dilakukan. Hal ini pada akhirnya menjadi tanggungjawab pemrakarsa pembangunan dalam menjamin keberlangsungan fungsi sosial tersebut. Sesuai dengan diharapkan terciptanya transformasi *negative peace* menjadi *positive peace* dimana semua

lapisan masyarakat akan merasakan keadilan sosial, kesetaraan dan kesejahteraan ekonomi.³⁸ Pentingnya dilakukan perencanaan yang lebih matang serta memperhatikan aspek sosial. Sehingga tidak meninggalkan kesan memaksa dari pemerintah untuk membebaskan tanah milik warga.

Berdasarkan 5 (lima) upaya penyelesaian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap upaya resolusi konflik mampu mengubah strategi konflik setiap pihak. Terlihat dari upaya pertama yakni litigasi, yang pada akhirnya dimenangkan oleh Pemerintah, cenderung membuat situasi konflik semakin memanas. Upaya dialog maupun negosiasi yang dilakukan Pemerintah bersama PT AP I turut cenderung menurunkan tingkat deeskalasi konflik.

Upaya resolusi konflik melalui dialog, negosiasi, serta pendekatan antar individu dengan tujuan untuk menemukan titik temu masing-masing kepentingan. Pemkab berusaha mengakomodasi kepentingan warga terdampak dengan (1) memaksimalkan ganti rugi sebagai upaya memenuhi kebutuhan tempat tinggal warga, dan (2) Pelatihan serta

³⁸ Aleksius Jemadu, *Politik Global dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 208.

pemberdayaan sebagai bentuk penyaluran terkait mata pencaharian warga. Namun, hasil penelitian turut memperlihatkan bahwa masih terdapat luka psikologis, kepahitan atas ketidakadilan yang dirasakan masyarakat terdampak pembangunan bandara.

Pemkab berusaha mentransformasi konflik yang telah berlangsung dan menjadi pergolakan sosial, dengan mengubah fenomena konflik menjadi damai. Ketersediaan untuk 'angkat kaki' bagi warga terdampak merupakan sebuah kekalahan, kalah-menang dalam hal ini merupakan damai yang negatif. Pemkab berusaha untuk mengubah damai menjadi positif (*positive peace*), yang menurut Galtung merupakan kondisi damai secara struktur, dilandasi pada keadilan, persamaan, dan kesetaraan.³⁹ Kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak terakomodasi, sehingga tidak ada perasaan kalah.

Terbangunnya relasi yang sehat, baik antara Pemerintah dan masyarakat, maupun sesama masyarakat (kontra dan Pro). Sehingga masyarakat kontra terdampak, meskipun harus merelakan tanahnya, mereka tetap tampil percaya diri di tatanan sosial masyarakat yang

baru. Dengan memulai kehidupan yang baru, bahkan lebih baik dari sebelumnya.

Kesimpulan

Konflik dilatarbelakangi kesenjangan antara kebijakan publik dengan opini publik. Pembangunan bandara NYIA sebagai proyek strategis nasional merupakan upaya meningkatkan pelayanan transportasi udara dalam memenuhi permintaan pasar. Pembangunan ini senada dengan visi strategis nasional maupun daerah, yaitu konektivitas serta mendukung peningkatan sektor pariwisata DIY. Pembangunan *aerocity* tersebut harus berhadapan dengan ketergantungan warga terdampak terhadap lahannya. Konflik juga terkait erat dengan persoalan tanah di DIY yang menjadi faktor struktural. Perbedaan kepentingan dan kebutuhan yang sama-sama penting menjadikan konflik vertikal ini sulit ditemukan titik temunya. Kompleksitas konflik tidak terlepas dari peran yang dimainkan oleh masing-masing aktor. Aktor provokator telah menggunakan informasi yang destruktif dalam mempengaruhi kelompok rentan. Sementara Pemkab Kulonprogo

³⁹ Johan Galtung, *Op. Cit.*, 155.

merupakan kelompok fungsional yang aktif dalam mengupayakan penghentian hingga transformasi konflik. Fenomena perempuan melawan merupakan salah satu temuan penting, para ibu-ibu menjadi garda depan penolakan dalam penggusuran yang dilakukan. Kemudian hal ini dikemas oleh aktivis untuk meraih simpati maupun dukungan solidaritas dari masyarakat luas. Melalui berbagai media, baik aktivis maupun pemerintah juga saling berlomba untuk membangun persepsi masyarakat terkait pembangunan bandara. Konflik yang berlangsung lama selama 6 (enam) tahun juga menimbulkan berbagai konsekuensi yang terjadi di masyarakat, yakni rusaknya kontrak sosial, terdapat intimidasi kekerasan, serta perubahan sikap masyarakat.

Resolusi konflik telah dilakukan oleh lembaga Pemerintah maupun nonpemerintah. Pemerintah Kabupaten sebagai pihak yang dilimpahkan tanggung jawab menangani penolakan masyarakat, telah menempuh cara-cara persuasif. Ombudsman RI sebagai lembaga negara juga telah berupaya dengan menjadi pihak ketiga yang netral dalam memediasi serta mendorong dialog pihak yang berkonflik. Keterlibatan Komnas HAM sebagai lembaga Nonpemerintah menjadi

mediator kedua belah pihak. Litigasi sebagai upaya resolusi konflik pertama, telah gagal menjadi *win-win solution*. Upaya tersebut justru meningkatkan eskalasi konflik yang cenderung rusuh. Pemkab menanggapi dengan menginisiasi langkah-langkah dialog maupun negosiasi, serta pendekatan antar individu, di samping memaksimalkan ganti rugi dan pemberdayaan masyarakat. Upaya pendekatan yang dilakukan tidak lain untuk mencapai titik temu yang saling memuaskan. Orientasi penyelesaian konflik lebih dominan dilakukan oleh Pemkab Kulon Progo, menggunakan cara informal untuk melakukan pendekatan kepada warga. Di samping dialog yang terus diupayakan, kepedulian Pemkab terhadap relokasi, alih profesi dan pemenuhan hak-hak warga berdampak juga menjadi standar baru bagi penyelesaian konflik agraria di kasus lain. Di samping keterlibatan pihak ketiga dalam menengahi konflik juga menjadi hal penting.

Rekomendasi

Akademis

1. Perlunya dilakukan penelitian kualitatif lebih lanjut dalam menganalisa potensi konflik terkait perubahan sosial masyarakat Kabupaten Kulon Progo

dan DIY secara umum yang diakibatkan oleh pembangunan Bandara NYIA. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif diharapkan dapat mengalisa tingkat keberhasilan Pemerintah dalam penyelesaian pembebasan lahan warga terdampak. Terutama dalam aspek fungsi sosial, peralihan profesi profesi (efektivitas program pelatihan keterampilan), dan dampak lingkungan yang diakibatkan pembangunan bandara.

2. Melihat temuan studi terkait ketahanan (*resilience*) masyarakat DIY secara luas dalam meredam konflik, perlu didalami lebih lanjut pengaruh terhadap kerangka kerja Pemerintah daerah. Penanganan konflik yang bersifat *bottom-up* perlu dievaluasi, mengingat proses elaborasi dan integrasinya memiliki keunikan tersendiri.
3. Studi di masa mendatang perlu memperhatikan peran dan keterlibatan lembaga nonpemerintah dan perempuan dalam resolusi konflik agraria, terutama implementasi UU pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Melalui penelitian yang komprehensif dengan dukungan dari berbagai pihak dan sumber daya yang memadai.

Praktis

1. Buka saluran dialog seluas mungkin pada masyarakat, untuk memenuhi semua kekhawatiran, kecemasan, dan harapan mereka. Kembali merangkul masyarakat yang terlanjur dikecewakan, tentu bukan tugas mudah. Namun pilihan langkah ini dapat disebut meraih momentum untuk mencapai pemerintahan yang lebih demokratis dan partisipatif.
2. Mendorong pemerintah dalam mempublikasikan kepada publik tentang desain pemberdayaan masyarakat terdampak serta keterlibatan lembaga nonpemerintah untuk turut membantu. Mengingat kekhawatiran terjadinya kemiskinan pada masyarakat terdampak, karena gagalnya alih profesi.
3. Masyarakat juga perlu kembali pada penghayatan dan pengamalan Pancasila, terutama muatan dan substansi yang termuat dalam sila keempat. Ia perlu menyadari untuk selalu memperhatikan dan memprioritaskan kepentingan nasional dan masyarakat. Karena pada dasarnya hak dan kewajiban masyarakat pada kedudukan yang sama, sehingga tidak bisa dipaksakan sebelum diputuskan berdasarkan musyawarah.

4. Lembaga-lembaga terkait sebaiknya bekerjasama dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang masih tersisa, terutama kehidupan warga setelah relokasi dan potensi-potensi konflik yang mengakar di DIY. Hal ini untuk menghindari terjadinya komplikasi antar konflik yang sudah mengakar dan potensi konflik baru.
5. Implementasi UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, terutama di tingkat masyarakat desa perlu sekali memperhatikan fungsi sosial. Karena bukan hanya soal ganti rugi, alih profesi dan kontrak sosial yang sudah terbangun sejak lama, menjadi hal yang tidak dapat dinilai. Pendekatan kekeluargaan (*door to door*) juga perlu dilakukan, bertujuan untuk mengetuk pribadi setiap masyarakat terdampak. Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, setidaknya tokoh setempat akan menjadikan masyarakat merasa dihormati haknya sebagai warga negara.
6. Pemerintah perlu untuk segera merumuskan mekanisme penyelesaian konflik agraria yang bersifat lintas sektor, terintegrasi dan terkoordinasi diperuntukan untuk pembangunan-pembangunan kepentingan umum selanjutnya. Dengan membuka ruang dialog strategis multi-pihak dan stakeholder mengenai fungsi sosial.
7. Pembangunan bagi kepentingan umum selanjutnya bisa belajar dari tindakan yang telah dilakukan oleh Pemkab Kulon Progo dalam penyelesaian konflik pembangunan bandara NYIA. Mengingat kerumitan dan kompleksitas dinamika konflik yang ada, konflik juga harus dihadapkan pada kondisi DIY yang 'istimewa'.

Daftar Pustaka

- Afrizal. 2006. *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*. Palembang: Andalas University Press.
- Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Antlov, Hans. 2004. *Citizen participation in local governance: experiences from thailand, indonesia and the philippines*. Manila: Institute for Popular Democracy.
- BPS Kabupaten Kulon Progo, *Statistik Daerah Kabupaten Kulon Progo 2017*.
- Buzan, Barry. 1991. *People, States and Fear*. New York: Harvester Wheatsheaf.
- Feist, Jess dan Gregory J. Feist. 2010. *Teori Kepribadian*. Jakarta: Selemba Humanika.

Galtung, Johan. 1996. *Peace by Peaceful Means*, London: Sage Publication.

Herdiansyah, Haris 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.

Herry, Musleh. 2012. *Kearifan Lokal dalam menyelesaikan Konflik Agraria*. Malang: UIN-Maliki Press.

Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jeong, Ho Won. 2008. *Understanding Conflict and analysis*. London: Sage Publication.

Konsorsium Pembaharuan Agraria. "Catatan Akhir tahun 2017". Dalam http://www.kpa.or.id/publikasi/baca/Laporan/25/Catatan_Akhir_Tahun_2017 diakses pada 17 Mei 2018.

Lay, Cornelis., dkk. 2008, "Keistimewaan Yogyakarta: Naskah Akademik dan Rancangan Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta", *Monograph on Politics and Government*. Volume 2 (1).

Leatherman, Janie., dkk. 2004. *Memutus Siklus Kekerasan: Pencegahan Konflik dalam Krisis Intranegara*. Yogyakarta: UGM Press.

Malik, Ichsan. 2017. *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian*. Jakarta: Kompas.

Minderop, Albertine. 2013. *Psikologi Sastra, Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Pruit, Dean G., dan Jeffrey Z., Rubin. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rauf, Maswadi. 2000. *Konsensus Politik*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.

Yukl, Gary. 1998. *Kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta: Prenhalindo.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.